



PENGARUH POLITIK IDENTITAS TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA

(*The Influence of Identity Politics on Indonesian Democracy*)

I PUTU SASTRA WINGARTA¹, BERLIAN HELMY², DWI HARTONO³, I WAYAN MERTADANA⁴,
REDA WICAKSONO⁵

¹Tenaga Profesional Lemhannas RI, ²Direktur Pengkajian Ideologi dan Politik Lemhannas RI, ³Kasubdit Kepemimpinan Nasional Lemhannas RI, ⁴Kasubdit Ideologi dan Politik Lemhannas RI, ⁵Analisis Kebijakan Ahli Muda Lemhannas RI. Email: ditpolitik@gmail.com Telepon: 021-3832442

ABSTRAK

Pasca reformasi kehidupan bangsa indonesia menghadapi tantangan merebaknya politik identitas yang mengedepankan golongan atau symbol tertentu guna mendapatkan pengaruh politik. Apabila hal ini dibiarkan akan mengganggu ketahanan nasional dan kualitas demokrasi di indonesia. Fenomena ini perlu dicari solusinya, agar keran demokrasi yang ada dapat dipergunakan dengan sesuai koridor hukum di indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian strategik jangka panjang tentang pengaruh politik identitas terhadap demokrasi di indonesia. Kajian ini menggunakan metode analisis kritis/deskriptif yang dilakukan melalui proses *Focus Group Discussion* (FGD), berbagai sumber kepustakaan (studi literatur) dan *Round Table Discussion* (RTD). Kemunculan politik identitas mencerminkan belum tercapainya transformasi masyarakat menuju masyarakat yang demokratis. Demokrasi masih bersifat "eksklusif" dan "transaksional", belum "transformasional". Belum mengakarnya ideologi Partai Politik di masyarakat mengakibatkan masyarakat tidak memiliki preferensi pasti dalam memilih, sehingga partai politik saat ini selain menggunakan praktek *money politics* untuk mendulang suara, dan juga menggunakan populisme simbol identitas berbasis "agama" dan "non-agama". Praktek Politik Identitas secara negatif berpengaruh pada pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan cita-cita demokrasi. Dalam hal ini pemerintah bersama masyarakat perlu meningkatkan edukasi politik agar tercipta masyarakat yang rasional dan mampu berpartisipasi sesuai koridor demokrasi yang ada di Indonesia.

Kata kunci: Politik Identitas, Populisme, Demokrasi.

ABSTRACT.

Post-reformation, the life of the Indonesian nation is facing the challenge of the spread of identity politics that prioritizes certain groups or symbols in order to gain political influence. It will disrupt national security and the quality of democracy in Indonesia. This phenomenon needs to find a solution, so that the existing democratic faucets can be used according to the legal corridors in Indonesia. Therefore, it is necessary to conduct a long-term strategic study of the influence of identity politics on democracy in Indonesia. This study uses a critical/descriptive analysis method which is carried out through a Focus Group Discussion (FGD) process, various literature sources (literature studies) and a Round Table Discussion (RTD). The emergence of identity politics reflects that the transformation of society towards a democratic society has not yet been achieved. Democracy is still "exclusive" and "transactional", not yet "transformational". Political party ideology has not yet taken root in society, resulting in people not having a definite preference in choosing, so that current political parties use the practice of money politics to gain votes, and also use populism, symbol of identity based on "religion" and "non-religion". The practice of Identity Politics negatively affects the implementation of democracy in Indonesia which is still not fully in accordance with the ideals of democracy. In this case the government and the community need to improve political education in order to create a rational society and able to participate in accordance with the corridors of democracy in Indonesia.

Keywords: Identity Politics, Populism, Democracy.



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan masyarakat majemuk yang berideologi Pancasila, namun pasca reformasi kehidupan bangsa Indonesia menghadapi tantangan salah satunya adalah merebaknya politik identitas yang mengedepankan identitas golongan atau symbol tertentu guna mendapatkan pengaruh politik.

Politik identitas pada awalnya muncul pada tahun 1970-an di Amerika Serikat untuk tuntutan perjuangan minoritas, gender, ras yang merasa terpinggirkan. Dalam sejarah manusia digerakkan oleh perjuangan untuk pengakuan. Satu-satunya solusi rasional untuk hasrat akan pengakuan universal ketika martabat setiap manusia dihargai. Adanya pengakuan universal ini mendapatkan tantangan lewat bentuk-bentuk pengakuan parsial lain berdasarkan bangsa, agama, sekte, ras, etnis, jenis kelamin, atau individu yang ingin diakui sebagai superior.

Pada politik praktis, identitas seringkali digunakan yang jauh dari nilai persatuan dan kesatuan, digunakan sebagai alat politik baik itu untuk meraup suara dalam pemilu, mendapatkan dukungan massa maupun dalam rangka tujuan politik untuk memisahkan diri dari NKRI. Karena pada dasarnya politik identitas merupakan fenomena politik yang menekankan pada perbedaan identitas. Tantangan berat yang

dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah politik Identitas yang menjurus kepada disintegrasi bangsa.

Demokrasi yang idealnya menampilkan diri dengan wajah yang inklusif, equal dan mengutamakan kebebasan hak sipil, justru terciderai oleh praktik-praktik politik identitas. Kondisi ini juga dapat ditemukan di Indonesia, dimana demokrasi sebagai pintu bagi kebangkitan politik identitas secara massif melalui bentuk konflik, kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok lain.

Politik identitas menguat karena *growing resentment*, akibat pengabaian terhadap kebutuhan akan pengakuan, entrepreneur of identity, yakni peran aktor-aktor kunci yang memobilisasi dan mempolitisasi identitas. Politik identitas mengancam karena Kecenderungan membatasi ketimbang membebaskan. Adanya ambiguitas klaim representasi dan legitimasi, berpotensi dimanipulasi oleh elit untuk mencapai kepentingannya. Fukuyama menggunakan cara pandang psikologi politik dalam melihat munculnya politik identitas. Secara naluriah, thymos adalah sifat manusia yang mencari pengakuan atas identitas untuk merasa bangga, dihormati dan lain-lain. Sementara Ishotymia adalah tuntutan seseorang untuk mendapatkan pengakuan dan perlakuan sama dengan orang lain



Sedangkan megalothymia adalah ketika seseorang merasa harus mendapatkan pengakuan yang lebih tinggi dibanding orang lain.

Beberapa fenomena politik identitas yang terjadi di era demokrasi antara lain adalah penggunaan politik identitas dibungkus kepentingan agama sebagai alat kelompok penekan untuk menyuarakan aspirasinya, melihat kondisi masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya melek politik dan hukum maka dikhawatirkan merebak sikap emosional yang mudah tersulut sehingga berakibat timbul konflik vertikal maupun horizontal yang justru akan merugikan keutuhan bangsa Indonesia. Di sisi lain politik identitas berdasarkan ras juga digunakan kelompok separatis untuk kepentingan memerdekaan diri dari pangkuan Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang terkait dengan populisme politik identitas, maka rumusan permasalahannya adalah “Bagaimana pengaruh politik identitas terhadap demokrasi Indonesia?” Adapun pertanyaan kajian disusun sebagai berikut:

- a. Bagaimana fenomena populisme politik identitas yang terjadi dalam kehidupan demokrasi di Indonesia?
 - b. Bagaimana corak ideologi partai politik Indonesia dalam mengelola fenomena politik identitas?
 - c. Apa potensi ancaman populisme politik identitas terhadap demokrasi di Indonesia ?
 - d. Bagaimana solusi mengatasi populisme politik identitas dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia?
- Fenomena ini merupakan tantangan yang dihadapi dan dicari solusinya agar keran demokrasi yang ada dapat dipergunakan dengan sesuai koridor hukum di Indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian strategik yang memberikan gambaran, analisis, dan pembahasan serta rekomendasi tentang bagaimana pengaruh politik identitas terhadap demokrasi Indonesia.

METODE

Penulisan naskah ini menggunakan metode analisis kritis/ deskriptif yang dilakukan melalui proses *Focus Group Discussion* (FGD), pengumpulan data/fakta dan pendalaman materi ke lokus Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan, berbagai sumber kepustakaan (studi literatur) dan *Round Table Discussion* (RTD) dengan menghadirkan berbagai tokoh Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Akademisi, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Media Massa untuk membahas secara komprehensif, integral, dan holistik segala permasalahan berkaitan dengan pengaruh politik identitas terhadap demokrasi Indonesia.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena munculnya populisme politik identitas yang terjadi dalam kehidupan demokrasi di Indonesia

Demokrasi saat ini seperti “pedang bermata dua”, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan demokrasi, sekaligus sebagai peluang untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan etika politik sehingga justru dapat mengancam kehidupan demokrasi maupun ketahanan nasional suatu bangsa.

Kemunculan politik identitas dalam setiap momen pertarungan politik mencerminkan belum tercapainya transformasi masyarakat menuju masyarakat yang demokratis dan belum terciptanya demokrasi yang terarah. Demokrasi yang berjalan hingga saat ini masih bersifat “eksklusif” dan “transaksional”, belum “transformasional”. Berbagai faktor yang menjadi pendorong politik identitas adalah keragaman Indonesia, Media sebagai aktor politik, Bisnis konsultan dan buzzer, Literasi medsos yang rendah, Tingkat pendidikan yang rendah, Kesadaran Bela Negara yang rendah, serta penegakan hukum yang lemah.

Penyebab masih digunakannya politik identitas pada kontestasi pemilu adalah sebagai “jalan pintas” untuk memperoleh suara secara

“murah dan meriah”, karena didukung oleh media sosial yang dapat dengan cepat menyebarkan informasi. Media sosial ditempatkan sebagai sarana strategis bagi para pihak berkepentingan untuk menyebarkan informasi yang isinya belum tentu benar dan akurat, bahkan cenderung mencampurkan antara “fakta” dan “opini” (post truth).

Praktik politisasi identitas senantiasa muncul pada tahun politik, baik itu pada tingkat pemilihan kepala daerah bahkan pemilihan presiden. Permasalahan praktik politisasi identitas pada pemilu di Indonesia dapat mempengaruhi ketahanan nasional, karena praktik tersebut berpotensi mengarah pada dampak yang berlawanan dengan tujuan demokrasi dan menjurus pada perpecahan yang menyebabkan terjadinya instabilitas politik dan disintegrasi bangsa Indonesia.

Corak ideologi partai politik di Indonesia dalam kaitannya dengan fenomena politik identitas

Terkait corak ideologi partai politik Indonesia dalam mengelola fenomena politik identitas. Corak ideologi partai politik di Indonesia yang memiliki identitas politik tertentu adalah sebuah “keniscayaan”. Agama adalah salah satu isu yang akan terus menegaskan perbedaan ideologi di antara corak partai-partai di Indonesia. Corak ideologi partai politik “tidak perlu



dikuatirkan” dan merupakan hal yang “lumrah” sebagai cara untuk menggaet dukungan dan suara yang sah secara hukum. Namun dalam praktiknya, partai politik memainkan politik identitas hanya semata-mata untuk mendulang suara dalam kepentingan “electoral vote”. Permasalahannya muncul ketika corak ideologi partai politik “dimanipulasi” dan “dieksplorasi” sedemikian rupa secara berlebihan untuk kepentingan “politik sempit” kelompoknya saja.

Di samping itu, Belum mengakarnya ideologi Partai Politik di masyarakat mengakibatkan masyarakat tidak memiliki preferensi pasti dalam memilih, sehingga partai politik saat ini selain menggunakan praktek money politics untuk mendulang suara, dan juga menggunakan populisme simbol identitas berbasis “agama” dan “non-agama”.

Menurut Siti Kholisoh, politik identitas dapat membawa beberapa dampak antara lain:

- a. Polarisasi sosial. Kelompok identitas Masyarakat terpecah, tantangan mengembalikan agar masyarakat bersatu kembali sebagai bangsa yang berbeda tetap satu tujuan (*Bhinneka Tunggal Ika*),
- b. Perlakuan tidak setara. Pembatasan terhadap kebebasan berbicara dan menghambat partisipasi bebas warga negara dalam demokrasi. pesan bahwa kelompok tertentu adalah warga kelas rendah (*subhuman*) dan karena itu tidak hanya berbahaya tetapi juga

tidak berhak mendapatkan perlakuan setara oleh negara, dan

- c. Psikologi sosial masyarakat. Masyarakat menjadi mudah tersinggung, gampang terbakar emosi, dan rentan terprovokasi.

Politik identitas juga dapat menjadi ancaman dalam hajatan demokrasi yakni:

- a. Politik identitas berpotensi mengecilkan bahkan menghilangkan identitas lain yang hidup di masyarakat,
- b. Politik identitas menutupi perdebatan program kerja berkualitas, dan
- c. Politik identitas lebih banyak memecah belah daripada mempersatukan masyarakat. Para pendukung merasa identitas mereka adalah kelompok pilihan ciptaan “terbaik” yang akan menyelesaikan masalah di daerahnya.

Populisme dan Politik Identitas

Di Indonesia, politik identitas lebih terkait dengan masalah etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal. Dalam kerangka historis, politik identitas di Indonesia lebih bermuatan etnisitas, agama, dan ideologi politik.

Politik identitas yang berlebihan dan bermuara pada konflik SARA tidak saja berimplikasi pada kualitas demokrasi tapi juga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Hal yang paling penting adalah bagaimana kita dapat membangun pondasi demokrasi yang kokoh agar tidak mudah



tergoyahkan oleh berbagai dinamika proses demokrasi.

Politik identitas yang terjadi di Indonesia juga mengarah kepada populisme bersentimenkan agama, dalam pertarungan politik baik pilkada 2017 dan pemilu 2019, konfrontasi antar dua kekuatan ekstrem politik identitas seolah meniadakan ruang moderasi (*wasathiyyah*) atau "jalan tengah" (*middle way*) yang mengedepankan rasionalitas dan kematangan berpikir.

Keberpihakan terhadap salah satu pihak seolah wajib dan berdiri di tengah seolah kesalahan. Alhasil, dinamika demokrasi tidak menyisakan ruang dialogis yang memadai. Sebaliknya, justru ketegangan, kebencian, dan sikap saling curiga kian menguat di tengah masyarakat. Realitas politik seperti itu merupakan peringatan keras bagi kian memudarnya fondasi persatuan dan kesatuan bangsa.

Politik identitas juga memunculkan fenomena garis kuasa mayoritas atas minoritas berwajah tirani spiritualisme, kelompok mayoritas akan memanfaatkan kondisinya untuk mendapatkan keuntungan politik atas minoritas, seperti melalui slogan "pilih yang mayoritas". Politik identitas sengaja dibangun oleh elite politik untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh, serta powersharing yang dibangun atas dasar identitas.

Di sisi lain, media sosial dapat "mempertajam perpecahan bangsa" dan "dapat

menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi". Perilaku dengan kesadaran politik masyarakat yang masih rendah dalam berinteraksi di sosial media memberikan dampak negatif terhadap edukasi politik dan nilai demokrasi Pancasila. Realitas politik seperti itu merupakan "early warning" bagi kehidupan demokrasi di Indonesia dan peringatan keras bagi kian memudarnya fondasi persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, kita harus menumbuh kembangkan dan menjaga iklim "budaya demokrasi" yang sesuai dengan nilai-nilai Demokrasi Pancasila.

Indonesia dalam konteks politik identitas kemudian dinilai sedang mengalami suatu potensi konflik relasi antara agama dan negara. Politik identitas diminati oleh elite politik di Indonesia, terlebih agama, sebagai "alat" jitu untuk meraup suara pemilih. Agama memang memiliki efek terhadap keikutsertaan politik. Dalam demokrasi politik identitas memang diperbolehkan, tetapi ketika politik identitas itu dilakukan berlebihan maka akan memiliki pengaruh-pengaruh yang tidak baik, terlebih di Indonesia yang mana masyarakatnya beragam, baik dari ras, suku, dan agama. Oleh karena itu perlu dikedepankan narasi inklusif bahwa negara tidak bertentangan dengan agama dan bahkan merupakan tugas negara untuk melindungi kebebasan menjalankan agama, negara memfasilitasi warga negara untuk dapat beribadah sesuai tuntutan agama, bahkan dalam regulasi dan



sistem tidak sedikit aturan yang telah mengadopsi aturan-aturan agama seperti di dalam Undang-Undang Perkawinan.

Politik identitas pada akhirnya merupakan fenomena yang sangat kompleks karena terkait dengan kepentingan politik sampai kepada hal yang bersifat ideologis. Politik identitas dapat diatasi dengan pendekatan Multikulturalisme cosmopolitan, dimana terbentuknya masyarakat kosmopolit yang tidak terlalu mementingkan identitas. Dalam masyarakat ini akan berusaha menghilangkan sama sekali batas-batas kultur sehingga setiap anggota secara individu maupun kelompok tidak lagi terikat oleh budaya tertentu. Kebebasan menjadi jagoan utama dalam keterlibatan dan eksperimen pengetahuan intelektual serta mengembangkan kehidupan kulturalnya masing-masing secara bebas.

SIMPULAN

Dalam rangka mengatasi fenomena politik identitas yang terjadi dalam kehidupan demokrasi di Indonesia Pemerintah, dalam hal ini Kemendagri RI dan Kemenkominfo RI serta Pemimpin Partai Politik agar lebih bersinergi dalam meningkatkan edukasi politik, khususnya dalam hal literasi politik dan literasi digital, untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis masyarakat. Kemudian Pemerintah perlu memperjelas aturan, disertai dengan sanksi yang

tegas terhadap penyebaran konten politik identitas yang menggunakan isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) dalam pemilu di semua level baik secara lisan, tertulis maupun dalam bentuk media lainnya.

Selain itu pemerintah juga dapat melakukan pemantapan nilai-nilai kebangsaan kepada seluruh komponen bangsa disertai "buku pedoman" agar masyarakat dapat menghayati dan mengamalkan nilai praksis Empat Konsensus Berbangsa dan Bernegara (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika).

Karakteristik ideologi partai politik di Indonesia sangat beragam yang mencerminkan kemajemukan masyarakat. Untuk menghindari partai politik terjebak ke dalam politik identitas dapat dilakukan pelatihan wawasan kebangsaan dan uji wawasan kebangsaan kepada calon peserta pemilu agar memiliki kesadaran untuk tidak menggunakan politik identitas dalam kontestasi politik.

Kemudian partai politik untuk membuat laporan akuntabilitas secara periodik baik keuangan maupun kinerja yang dipublikasi kepada masyarakat, untuk menciptakan budaya politik yang rasional dan partisipatif, serta membuka opsi pilihan seluas-luasnya agar tidak terjadi polarisasi yang tajam di masyarakat yang dapat memicu politik identitas.

Populisme dan politik identitas apabila dibiarkan akan menjadi ancaman terhadap



demokrasi di Indonesia yang mengedepankan persatuan walaupun terdapat perbedaan. Untuk mengatasi potensi ancaman tersebut dapat dilakukan menyadarkan masyarakat agar tidak terjebak dalam mentalitas "majoritas merasa minoritas" (majority with minority complex) yang diciptakan oleh kelompok tertentu. Negara perlu membuka ruang dialog yang terbuka dan seluas-luasnya dalam membangun saling kesepahaman untuk meyakinkan kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi partisipasi dan keadilan dalam berdemokrasi.

Kemudian, perlunya kampanye "politik harmoni" yang diserukan oleh pemerintah untuk merawat kebhinnekaan, dan "fatwa haram" penggunaan politik identitas yang bersifat merusak (destruktif), serta rejuvevasi terhadap nilai-nilai semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang menjadi konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Yaitu melakukan pembaharuan pada "nilai instrumen" dan "nilai praksis" dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, H. F. 2019. *Politea Jurnal Pemikiran Politik Islam* STAIN Kudus.
- Benhabib, S. (Ed). 1996. *Democracy and difference: Contesting the boundaries of the political.* New Jersey: Princeton University Press.
- Frenki. 2021. Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik pada Pemilihan Umum di Indonesia. *As-Siyasi Journal of Constitutional Law.* ejournal.radenintan.ac.id
- Hurriyah. 2021. *Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia.* Puskapol UI. Jakarta.
- Kholisoh, S. 2021. Politik Identitas dan Siar Kebencian: Partisipasi Masyarakat Sipil. Lemhannas RI.
- Lukman, F. 2021. Politik Identitas dalam Demokrasi di Indonesia. Jakarta.
- Romli, L. 2021. Politik Identitas dan Probleml Konsolidasi Demokrasi. Lemhannas RI.
- Sari, E. 2016. Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta. KRITIS. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Volume 2 No. 2.*
- Soenjoto, W. P. P. 2019. Eksplorasi Isu Politik Identitas Terhadap Identitas Politik Pada Generasi Milenial. *Journal of Islamic Studies and Humanities Vol. 4, No. 2.* STITNU Al Hikmah Mojokerto.
- Sofyan, B. T. 2021. Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia. Lemhannas RI.
- Umam, A. K. 2021. Tantangan Populisme dan Politik Identitas di Indonesia. Lemhannas RI.
- Yuhastihar. 2021. Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia. Jakarta.